

RANCANGAN AWAL RENCANA KERJA

TAHUN 2021



**DINAS SOSIAL,
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,
DAN PERLINDUNGAN ANAK**

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan syukur kehadiran Allah SWT, Tuhan yang Maha Esa, Rencana Kerja Tahun 2021 Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dapat diselesaikan.

Rencana Kerja Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak disusun Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel serta mempunyai orientasi pada hasil yang diharapkan.

Dokumen Rencana Kerja (Renja) Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ini juga merupakan dokumen dasar dalam penyusunan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Rencana Kerja 2021 Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Probolinggo ini diharapkan dapat memberikan arah institusi dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

Probolinggo, Desember 2020

Plt. Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan
dan Perlindungan Anak Kota Probolinggo



RACHMA NURCAHYARINI, S.Sos., M.Si.

Pembina Tk. I

NIP 19731110 199302 2 002

DAFTAR ISI

Sampul	1
Kata Pengantar	2
Daftar Isi	3
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	4
1.2 Landasan Hukum	5
1.3 Maksud dan Tujuan	6
1.4 Sistematika Penulisan	6
BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU	
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah	8
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	31
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	32
2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD	33
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	48
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	
3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional	54
3.2 Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah	59
3.3 Program dan Kegiatan	60
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	70
BAB V PENUTUP	75

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sebagaimana diamanatkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa setiap (Perangkat Daerah) PD berkewajiban menyusun Perencanaan Pembangunan Daerah. Salah satu dokumen perencanaan pembangunan daerah adalah Rencana Kerja (Renja) Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Rencana Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak berisi rancangan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam waktu 1 (satu) tahun sesuai tugas pokok dan fungsinya dalam rangka menunjang visi dan misi Kepala Daerah. Renja ini berfungsi untuk menjabarkan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang merupakan dokumen rencana kerja pemerintah lima tahunan, yang juga dijadikan sebagai tolak ukur penilaian kinerja penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan sebagai dasar pertanggungjawaban Kepala Daerah.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah dimulai dari penyusunan rancangan awal, penyusunan rancangan, pelaksanaan forum perangkat daerah, penyusunan rancangan akhir dan penetapan. Proses penyusunan Renja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak terdiri dari tiga tahapan utama yaitu:

a. Tahap persiapan penyusunan,

Tahapan persiapan meliputi pembentukan tim penyusun Renja , orientasi mengenai Renja, penyusunan agenda kerja, serta penyiapan data dan informasi.

b. Tahap penyusunan rancangan, dan

Penyusunan rancangan Renja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak merupakan tahapan awal yang harus dilakukan sebelum disempurnakan menjadi dokumen Renja yang definitif. Dalam prosesnya, penyusunan rancangan Renja Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal. Oleh karena itu penyusunan rancangan Renja dapat dikerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan rancangan awal RKPD, dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting, evaluasi

pelaksanaan Renja tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

- c. Tahap penetapan renja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Tahap penetapan rancangan akhir Rencana Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dilakukan dengan ditetapkan dalam bentuk Peraturan Walikota untuk menjadi pedoman di lingkungan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam menyusun program dan kegiatan prioritas pada tahun anggaran berkenaan.

Renja mempunyai arti yang strategis dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintahan daerah mengingat beberapa hal sebagai berikut:

- a. Renja SKPD merupakan dokumen yang secara substansial penerjemahan dari visi, misi dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Instansi sesuai arahan operasional dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
- b. Renja merupakan acuan SKPD untuk memasukkan program kegiatan kedalam KUA dan PPAS dan perencanaan program kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) tahun 2022.
- c. Renja SKPD merupakan salah satu instrument untuk evaluasi pelaksanaan program/kegiatan instansi untuk mengetahui sejauhmana capaian kinerja yang tercantum dalam Rencana Kinerja Tahunan sebagai wujud dari kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah pada tahun 2021 yang merupakan pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Perencanaan Strategis (Renstra).

Renja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mempunyai kedudukan yang strategis yaitu menjembatani antara perencanaan Strategis Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), sebagai implementasi pelaksanaan strategis jangka menengah (RPJMD). Renja OPD digunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah untuk penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota dan sebagai dasar pengusulan program/kegiatan yang akan dibiayai APBD Provinsi dan APBN.

1.2 Landasan Hukum

Dokumen RENJA ini merupakan Rencana Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Probolinggo yang disusun setiap tahun sebagai Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya ditetapkan sebagai Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Probolinggo.

Berkaitan dengan penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang merupakan instrument pertanggungjawaban, RENJA ini merupakan langkah awal untuk melaksanakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara

Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah; Peraturan Walikota Nomor: 69 Tahun 2020 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2019; Surat Edaran Walikota Probolinggo Nomor: 050/740/425.201/2019 Tanggal 11 Maret tentang Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2020 dan sekaligus langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja instansi pemerintah sebagaimana ketentuan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999.

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1. Maksud

Penyusunan RENJA Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Probolinggo Tahun Anggaran 2021 dimaksudkan agar Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Probolinggo mampu menjawab tuntutan lingkungan strategi lokal, regional, nasional dan global sehingga disamping tetap berada dalam tatanan Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia, juga mampu eksis dan berkembang dalam rangka meningkatkan kinerja profesionalnya.

1.3.2. Tujuan

Adapun tujuan disusunnya RENJA Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Probolinggo Tahun Anggaran 2022 adalah untuk: (1) menjabarkan arah RPJMD Kota Probolinggo Tahun 2019 – 2024 ke dalam rencana instansional; (2) menjabarkan visi dan misi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Probolinggo Tahun 2019 – 2024 ke dalam tujuan, sasaran dan program kerja operasional; (3) menyediakan dokumen rencana kerja atau rencana kinerja tahunan; (4) menentukan strategi untuk: pengelolaan keberhasilan, penguatan komitmen yang berorientasi pada masa depan, adaptif terhadap perubahan lingkungan strategis, peningkatan komunikasi vertical dan horizontal, peningkatan produktivitas dan menjamin efektivitas penggunaan sumber daya organisasi.

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Probolinggo tahun 2019 – 2024 secara garis besar disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

- 3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2. Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah
- 3.3. Program dan Kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan RENJA Tahun Lalu dan Capaian RENSTRA

Perangkat Daerah Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak terdiri dari satu sekretariat, empat bidang, dan dua Unit pelayanan Terpadu. Hasil Renja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Probolinggo Tahun 2020 secara umum telah dilaksanakan dengan optimal dan beberapa kegiatan telah mencapai target yang ditetapkan.

Capaian Kinerja tahun 2020 dapat dilihat dengan membandingkan antara capaian atau hasil pelaksanaan program/kegiatan sebagaimana telah ditetapkan dalam DPA dengan target yang ditetapkan dalam Rencana Strategis.

Secara umum diperoleh hasil bahwa capaian kinerja 2020 telah memenuhi target yang ditetapkan. Hal ini dikarenakan dapat terlaksananya hampir semua kegiatan dan dapat memenuhi output yang diharapkan.

Review hasil pelaksanaan Renja OPD dapat dilihat sebagai berikut :

1. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program/kegiatan secara langsung terwujud dalam peningkatan fungsi sosial dan peran kelompok sasaran program/kegiatan yang memberikan kontribusi dalam penurunan angka kemiskinan. Selain itu Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial dapat tergali dan didayagunakan secara maksimal untuk mitra dalam pembangunan kesejahteraan sosial.
2. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor terhambatnya pelaksanaan program/kegiatan tersebut antara lain dengan melakukan Perubahan Anggaran jika terjadi kesalahan dalam pengusulan anggaran atau dengan melakukan pergeseran anggaran sehingga target anggaran bisa ditingkatkan pada tahun berjalan.

Secara rinci hasil kegiatan tahun 2020 diuraikan sebagai berikut:

Tabel dibawah ini mencantumkan Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Tahun 2022 dengan kondisi Perangkat Daerah secara terpisah. Pada Tahun 2019 masih Dinas Sosial Kota Probolinggo dan pada tahun 2020 merger dengan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, sehingga menjadi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kota Probolinggo. Pada Tahun 2021 Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan terdapat perbedaan nomenklatur, hal ini disebabkan dengan ditetapkannya Permendagri No. 90 Tahun 2019

**REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH DAN PENCAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TAHUN 2022
KOTA PROBOLINGGO**

Kode	Uusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun	Realisasi Target Kinerja Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d Tahun (n-3) dalam %	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2020)						Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2021)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Pemerintah Daerah Tahun (2020)		Realisasi Renja Perangkat Daerah (2020)		Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Capaian Program dan kegiatan s/d Tahun Berjalan (2021)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
					K	Rp	K	Rp	K	Rp			
1	2	3	4	5	K	Rp	K	Rp	K	Rp	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	URUSAN SOSIAL												
110600.1106 01.01	Peningkatan Kinerja Lembaga dan Aparatur Pemerintah	Persentase Capaian Kinerja Program Minimal 80%			92	Rp 1.890.851.874	36 0	Rp 805.161.963	391, 30%	42,5 8%	-		
110600.1106 01.01.001	1 Pengelolaan Administrasi Keuangan	Persentase Laporan Keuangan yang tepat waktu	85	100	85	Rp 62.733.100	60	Rp 36.893.000	70,5 9%	58,8 1%	-		
		Persentase Realisasi Keuangan Kegiatan dengan Capaian Minimal 80%	85	100	85		60		70,5 9%				

110600.1106 01.01.002	2	Pengelolaan Tata Usaha Perkantoran	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Kelancaran Administrasi Perkantoran	85	100	85	Rp 1.688.858.774	60	Rp 728.212.963	70,5 9%	43,1 2%	-		
			Persentase Administrasi Kependidikan yang Tepat Waktu	85	100	85		60		70,5 9%				
			Persentase Ketatalaksanaan Tepat Waktu	85	100	85		60		70,5 9%				
110600.1106 01.01.003	3	Pengelolaan Kinerja Program dan Kegiatan	Persentase Capaian Kinerja Kegiatan	80	100	80	Rp 139.260.000	50	Rp 40.056.000	62,5 0%	28,7 6%	-		
110600.1106 01.05		Pelayanan Rehabilitasi Perlindungan dan Jaminan Sosial	Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang mendapatkan Pelayanan Rehabilitasi dan Jaminan Sosial			92, 51	Rp 2.501.951.000	25	Rp 597.146.600	27,0 2%	23,8 7%			
110600.1106 01.05.001	1	Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Anak dan Lanjut Usia	Jumlah Anak Terlantar yang mendapatkan Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial	70	100	40	Rp 291.188.000	60	Rp 120.107.500	150, 00%	41,2 5%			
			Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial	15	100	12 0		68		56,6 7%				
110600.1106 01.05.002	2	Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas dan Tuna Sosial	Jumlah Penyandang Disabilitas yang mendapatkan Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial	70	100	50	Rp 303.817.000	40	Rp 139.790.100	80,0 0%	46,0 1%			

			Jumlah Tuna Sosial yang mendapatkan Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial	170	100	170		60		35,29%			
110600.1106 01.05.003	3	Perlindungan dan Jaminan Sosial	Jumlah Sasaran yang Mendapatkan Pembinaan dan Advokasi dari LK3	40	100	50	Rp 1.906.946.000	0	Rp 337.249.000	0,00%	17,69%		
			Jumlah Sasaran yang Mendapatkan Perlindungan dan Jaminan Sosial	30	100	1300		1,253		96,38%			
			Jumlah Sasaran yang mendapatkan Sosialisasi/Pembinaan Bencana Berbasis Masyarakat	50	100	300		0		0,00%			
			Persentase Korban Bencana yang Mendapat Perlindungan dan Jaminan Sosial	90	100	60		0		0,00%			
110600.1106 01.06	PEMBERDAYAAN SOSIAL DAN PENANGANAN FAKIR MISKIN	Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang mendapatkan Upaya Pemberdayaan Sosial			0,55	Rp 4.685.077.500	0	Rp 234.988.059	0,00%	5,02%			
110600.1106 01.06.001	1	Penanganan Fakir Miskin	Jumlah Masyarakat Miskin yang Mendapatkan Layanan Pengentasan Kemiskinan	60	85	1207	Rp 689.652.600	0	Rp 101.983.000	0,00%	14,79%		
110600.1106 01.06.002	2	Identifikasi dan Penguatan Kapasitas	Persentase Kegiatan Verval yang terlaksana	0,005522334	100	100	Rp 988.681.512	5	Rp 53.001.059	5,00%	5,36%		
110600.1106 01.06.003	3	Pemberdayaan Kelembagaan Sosial Masyarakat	Jumlah Sasaran dari Orsos yang mendapatkan Upaya-Upaya Pemberdayaan Sosial	280	100	515	Rp 758.190.888	29	Rp 80.004.000	5,63%	10,55%		

			Jumlah Kegiatan Pelestarian Nilai-Nilai Kepahlawanan dan Kesetiakawanan Sosial	100	100	10		0		0,00 %				
110600.1106 01.07	Pembinaan Lingkungan Sosial								Rp 300.321.500					
110600.1106 01.07.001	1	Pembinaan dan Pelatihan Keterampilan Kerja bagi Tenaga Kerja dan Masyarakat melalui Pelatihan Wirausaha Mandiri bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial	Jumlah Masyarakat Miskin yang mendapat pelatihan Keterampilan Usaha	2	67	85	Rp 100.700.000	85	Rp 100.693.000	100,00%	99,99%			
110600.1106 01.07.002	2	Pembinaan dan Pelatihan Keterampilan Kerja bagi Tenaga Kerja dan Masyarakat melalui Pelatihan Wirausaha Mandiri bagi Kepala Rumah Tangga Perempuan	Jumlah Kepala Rumah Tangga/Janda yang mendapat pelatihan Keterampilan Usaha	30	100	30	Rp 49.858.000	30	Rp 49.858.000	100,00%	100,00%			
110600.1106 01.07.003	3	Pembinaan dan Pelatihan Keterampilan Kerja bagi Tenaga Kerja dan Masyarakat melalui Pelatihan Wirausaha Mandiri Bagi Masyarakat	Jumlah Penyandang Disabilitas yang Mendapatkan Pelatihan Keterampilan Usaha	40	100	15	Rp 66.450.000	15	Rp 66.447.500	100,00%	100,00%			

110600.1106 01.07.004	4	Pembinaan dan Pelatihan Keterampilan Kerja bagi Tenaga Kerja dan Masyarakat melalui Pelatihan Wirausaha Mandiri bagi Penyandang Disabilitas	Jumlah Anak Nakal/Terlantar/Putus sekolah dan Lansia Produktif yang mendapatkan Pelatihan Keterampilan Usaha	15	100	35	Rp 83.324.000	35	Rp 83.323.000	100 %	100 %			
121.800.110.601	Keberdayaan Masyarakat		Persentase Peningkatan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang Berpartisipasi Dalam Upaya Pemberdayaan Masyarakat			90	Rp 195.822.750	40	Rp 2.796.500	44,44 %	1,43%			
121800.1106 01.02	1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat	Jumlah Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang Berpartisipasi Dalam Upaya Pemberdayaan Masyarakat	225	100	225	Rp 195.822.750	40	Rp 2.796.500	17,78 %	1,43%			
URUSAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK														
120200.1106 01.01	Pemberdayaan Perempuan		Persentase Peningkatan Peran Serta Kelompok Masyarakat dan Perangkat Daerah dalam Pengarusutamaan Gender (PUG)				Rp 603.648.500	208	Rp 74.074.500		12,27 %			
120200.1106 01.01.001	1	Pemberdayaan dan Kualitas Hidup Perempuan	Jumlah Perempuan yang mendapatkan fasilitasi peningkatan kapasitas ekonomi			200	Rp 450.701.500	60	Rp 65.589.500	30,00 %	14,55 %			

			Persentase peningkatan keterlibatan perempuan dalam pemerintahan, lembaga politik, organisasi wanita		2,6		1		19,23 %			
			Persentase organisasi wanita yang berperan aktif dalam pembangunan		41		20		48,78 %			
120200.1106 01.01.002	2	Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG)	Jumlah program dan kegiatan pemerintah daerah yang dilengkapi dokumen ARG yang berkualitas		235	Rp 152.947.000	127	Rp 8.485.000	54,04 %	5,55%		
120200.1106 01.02	Perlindungan Perempuan dan Anak		Persentase efektifitas P2TP2A dalam penanganan permasalahan perempuan dan anak		100	Rp 356.172.375		Rp 147.793.500	41,49 %			
			Persentase pencapaian indikator Kota Layak Anak		30							
120200.1106 01.02.001	1	Peningkatan Perlindungan Perempuan dan Anak	Persentase kekerasan terhadap Perempuan dan Anak yang ditangani dan diselesaikan		100	Rp 214.697.000	60	Rp 63.543.500	60,00 %	29,60 %		
			Persentase pekerja perempuan dan anak yang mendapatkan pengawasan dan perlindungan		25		5		20,00 %			

			Persentase jejaring yang berperan dlm penanganan permasalahan perempuan dan anak		25		5		20,00 %				
120200.1106 01.02.002	2	Pengarusutamaan Hak dan tumbuh kembang Anak	Jumlah Kecamatan Layak Anak dan Kelurahan Layak Anak yang diinisiasi		20	Rp 141.475.375	40	Rp 84.250.000	200,0 0%	59,55 %			
			Jumlah Kampung Ramah Anak dan Forum Anak		25		5				20,00 %		
			Jumlah PATBM		29		10				34,48 %		
120200.1106 01.03	Pembinaan Lingkungan Sosial		Persentase peningkatan jumlah perempuan yang mendapatkan pelatihan ketrampilan		20,89	Rp 161.247.500	60	Rp 128.119.800	287,2 2%	79,46 %			
120200.1106 01.03.001	1	Pembinaan dan Pelatihan Keterampilan Kerja bagi Perempuan di Kota Probolinggo	Jumlah perempuan yang medapatkan pelatihan keterampilan		50	Rp 161.247.500	60	Rp 128.119.800	120,0 0%	79,46 %			

SOSIAL												
PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang mendapatkan Rehabilitasi Sosial											
Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Jumlah anak terlantar dan lanjut usia terlantar yang mendapatkan pelayanan dan rehabilitasi sosial											
Penyediaan Permakanan	Jumlah lanjut usia terlantar yang mendapatkan pelayanan dan rehabilitasi sosial									50 Orang	50 Orang	100%
Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial (DBH-CHT)	Jumlah anak terlantar dan lanjut usia terlantar yang mendapatkan pelayanan dan rehabilitasi sosial									50 Orang	50 Orang	100%
Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/Aids dan Napza di Luar Panti Sosial	Jumlah penyandang disabilitas dan tuna sosial yang mendapatkan pelayanan dan rehabilitasi sosial											

Penyediaan Permakanan	Jumlah penyandang disabilitas dan tuna sosial yang mendapatkan pelayanan dan rehabilitasi sosial									224 Orang	224 Orang	100%
Penyediaan Sandang	Jumlah penyandang disabilitas dan tuna sosial yang mendapatkan pelayanan dan rehabilitasi sosial									120 Orang	120 Orang	100%
Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial (DBH-CHT)	Jumlah Disabilitas, Pemulung dan fakir miskin yang mendapatkan pelayanan dan rehabilitasi sosial									20 Orang	20 Orang	100%
Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga PMKS Lainnya bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA (BK PROV)	Jumlah penyandang disabilitas dan tuna sosial yang mendapatkan pelayanan dan rehabilitasi sosial									10 Orang	10 Orang	100%
PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang mendapatkan Pelayanan Sosial											
Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/ Kota	Jumlah sasaran yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial											
Penanganan Khusus Bagi Kelompok Rentan	Jumlah sasaran yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial									470 Orang	470 Orang	100%

Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah sasaran yang mendapatkan sosialisasi/pembinaan bencana berbasis masyarakat serta perlindungan dan jaminan sosial											
Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Jumlah SDM yang mengikuti Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana									200 Orang	200 Orang	100%
PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang mendapatkan Jaminan Sosial											
Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar	Jumlah anak terlantar dan lanjut usia terlantar yang mendapatkan pelayanan dan rehabilitasi sosial											
Pemantauan Terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar	Jumlah anak terlantar yang mendapatkan pelayanan dan rehabilitasi sosial									270 Orang	270 Orang	100%
Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah masyarakat miskin yang mendapatkan layanan pengentasan kemiskinan											
Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah masyarakat miskin yang mendapatkan layanan pengentasan kemiskinan									202 Orang	202 Orang	100%

Facilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Jumlah masyarakat miskin yang mendapatkan layanan pengentasan kemiskinan									100 Orang	100 Orang	100%
Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase kegiatan verval yang terlaksana									100%	100%	100%
PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang mendapatkan Upaya Pemberdayaan Sosial											
Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah sasaran dari orsos yang mendapatkan upaya-upaya pemberdayaan sosial											
Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah sasaran dari orsos yang mendapatkan upaya-upaya pemberdayaan sosial									100 Orsos	100 Orsos	100%
Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	Jumlah sasaran yang mendapatkan pembinaan dan advokasi LK3									60 Orang	60 Orang	100%

PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang mendapatkan Pelayanan Sosial											
Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan pelestarian nilai-nilai kepahlawanan dan kesetiakawanan sosial											
Rehabilitasi Sarana Dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan pelestarian nilai-nilai kepahlawanan dan kesetiakawanan sosial								2 Kegiatan	2 Kegiatan	100%	
Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan pelestarian nilai-nilai kepahlawanan dan kesetiakawanan sosial								3 Orang	3 Orang	100%	
Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan pelestarian nilai-nilai kepahlawanan dan kesetiakawanan sosial								2 Orang	2 Orang	100%	

PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK												
PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase Peningkatan Peran Serta Kelompok Masyarakat dan Perangkat Daerah dalam Pengarusutamaan Gender (PUG)									49%	49%	100%
Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kabupaten/Kota	Jumlah perempuan yang mendapatkan fasilitasi peningkatan kapasitas ekonomi, hukum, politik, sosial, dan organisasi kemasyarakatan									49%	49%	100%
Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah perempuan yang mendapatkan fasilitasi peningkatan kapasitas ekonomi, hukum, politik, sosial, dan organisasi kemasyarakatan									100 Orang	100 Orang	100%
Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah keterlibatan perempuan dalam pemerintahan, lembaga swasta, politik, dan organisasi kemasyarakatan									300 Orang	300 Orang	100%

Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah program dan kegiatan pemerintah daerah yang dilengkapi dokumen ARG yang berkualitas									49%	49%	100%
Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah program dan kegiatan pemerintah daerah yang dilengkapi dokumen ARG yang berkualitas									6 Kegiatan	6 Kegiatan	100%
Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah program dan kegiatan pemerintah daerah yang dilengkapi dokumen ARG yang berkualitas									2 Kegiatan	2 Kegiatan	100%
Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Jumlah program dan kegiatan pemerintah daerah yang dilengkapi dokumen ARG yang berkualitas									250 Dokumen	250 Dokumen	100%
Sosialisasi kebijakan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Jumlah program dan kegiatan pemerintah daerah yang dilengkapi dokumen ARG yang berkualitas									100 Orang	100 Orang	100%
PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Persentase Peningkatan Peran Serta Kelompok Masyarakat dan Perangkat Daerah dalam Pengarusutamaan Gender (PUG)									49%	49%	100%

Peningkatan Kualitas Keluarga dalam mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah perempuan yang mendapatkan fasilitasi peningkatan kapasitas ekonomi									49%	49%	100%
Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota (DBH-CHT)	Jumlah perempuan yang mendapatkan fasilitasi peningkatan kapasitas ekonomi									104 Orang	104 Orang	100%
PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Persentase Peningkatan Peran Serta Kelompok Masyarakat dan Perangkat Daerah dalam Pengarusutamaan Gender (PUG)											
Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/kota	Jumlah ketersediaan data gender dan anak											
Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah ketersediaan data gender dan anak											

Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah ketersediaan data gender dan anak											
PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Persentase efektifitas P2TP2A dalam penanganan permasalahan perempuan dan anak									100%	100%	100%
Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase kekerasan terhadap perempuan dan anak yang ditangani dan diselesaikan									100%	100%	100%
Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase kekerasan terhadap perempuan dan anak yang ditangani dan diselesaikan									100%	100%	100%

Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase kekerasan terhadap perempuan dan anak yang ditangani dan diselesaikan									100%	100%	100%
Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak serta jejaringnya dan persentase kasus perempuan dan anak yang mendapat pengawasan dan perlindungan									100%	100%	100%
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase kekerasan terhadap perempuan dan anak yang ditangani dan diselesaikan									100%	100%	100%
Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase jejaring yang berperan dalam penanganan permasalahan perempuan dan anak									25%	25%	100%

PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Persentase pencapaian indikator layak anak									30%	30%	100%
Pelebagaan PHA pada lembaga pemerintah, non pemerintah, dan dunia usaha kewenangan kabupaten/ kota	Jumlah kecamatan dan kelurahan layak anak yang diinisiasi									30%	30%	100%
Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah kampung ramah anak									25 KRA	25 KRA	100%
Koordinasi dan Sinkronisasi Pelebagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah kecamatan layak anak dan kelurahan layak anak yang diinisiasi									5 Kelurahan	5 Kelurahan	100%
PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Persentase efektifitas P2TP2A dalam penanganan permasalahan anak									100%	100%	100%

Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penanganan kasus kekerasan terhadap anak yang mendapat pengawasan dan perlindungan									100%	100%	100%
Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase pekerja perempuan dan anak yang mendapatkan pengawasan dan perlindungan									25%	25%	100%
Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten Kota	Jumlah kampung ramah anak, forum anak, PATBM yang dibina dan Hari Anak Nasional									100%	100%	100%
Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Daerah Kab/Kota	Jumlah PATBM									29 Kelurahan	29 Kelurahan	100%

Pengembangan Komunikasi, informasi dan Edukasi Anak yang memerlukan perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah pembinaan forum anak									1 Forum Anak	1 Forum Anak	100%
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT												
PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT, DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Persentase Peningkatan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang Berpartisipasi Dalam Upaya Pemberdayaan Masyarakat											
Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah	Jumlah Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial yang berpartisipasi dalam upaya pemberdayaan masyarakat											

Kabupaten/Kota											
Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Jumlah Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial yang berpartisipasi dalam upaya pemberdayaan masyarakat								225 Orang	225 Orang	100%

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Ruang lingkup strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial Kota Probolinggo tidak terlepas dari Undang - undang No. 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial menjadi pedoman pada pelaksanaan Pembangunan Kesejahteraan Sosial. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Probolinggo mempunyai kewenangan untuk menanggulangi permasalahan kesejahteraan sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Sasarannya adalah individu, keluarga, organisasi dan komunitas yang memerlukan pelayanan sosial.

Untuk urusan Sosial Standar Pelayanan yang digunakan sebagai analisis kinerja pelayanan OPD yang merujuk pada SPM Bidang Sosial yang terdiri dari :

**PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KOTA PROBOLINGGO**

No	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Capaian Analisis
				2020	2021	2022	2024	2020	2021	2022	2023	
1	Presentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di luar Panti Skala Kab / Kota	Jumlah Penyandang Disabilitas yang mendapatkan Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial	50	55	60	70	40	55	60	70	
		Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar diluar panti	Jumlah Anak Terlantar yang mendapatkan Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial	40	50	60	70	60	50	60	70	
		Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar diluar panti	Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial	120	130	140	150	68	130	135	140	
		Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial khususnya Gelandangan dan Pengemis diluar panti	Jumlah Tuna Sosial yang mendapatkan Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial	170	170	170	170	60	100	110	120	

	Perlindungan dan Jaminan Sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi Korban Bencana Kota	Persentase Korban Bencana yang Mendapat Perlindungan dan Jaminan Sosial	60	70	80	90	100	100	100	100
--	--	---	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----

Kinerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Probolinggo diukur berdasarkan Tingkat pencapaian indikator sasaran atau yang disebut dengan indikator kinerja utama (IKU) serta menggambarkan pula tingkat capaian pada program/kegiatan.

Target Indikator Sasaran Kinerja Daerah

SASARAN	INDIKATOR SASARAN							
	Indikator	Satuan	Kinerja Awal (2020)	Target Kinerja				
				2020	2021	2022	2023	2024
Meningkatnya Cakupan Perlindungan Sosial Masyarakat	Persentase PMKS	%	31,17	31,03	29,43	27,79	26,63	24,85
Meningkatnya Keberdayaan dan Kesetaraan Gender	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Indeks	67,76	68,55	68,95	69,35	69,75	70,15

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Secara umum isu-isu strategis yang dihadapi oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam kurun waktu 2021, adalah sebagai berikut:

a. Belum optimalnya Penanganan Penyandang Kesejahteraan Masyarakat

Adanya kebutuhan atas penanganan masyarakat miskin dan penyandang kesejahteraan masalah social masih tergantung dari bantuan, banyaknya masyarakat penyandang kesejahteraan social belum dapat tertangani secara maksimal dikarenakan mobilitasi penduduk dari kota lain misalnya seperti gelandangan, psikotis, dan lain sebagainya. Sedangkan data bantuan seperti masih tergantung dari pusat. Dalam menangani urusan social terutama pada penyandang kesejahteraan sosial terkadang tidak sesuai dengan

perencanaan atas kebutuhan pemberian bantuan dan pemberdayaan, hal ini juga dipengaruhi oleh harapan hidup seseorang dan kematian.

Namun permasalahan itu dapat diatasi dengan adanya kerjasama dan koordinasi dari berbagai sector. Adanya pendataan berbasis system informasi Teknologi yang lebih akurat dan mempercepat proses pemberian bantuan, pemberdayaan PMKS, serta banyaknya rekan kerja hingga ke wilayah terkecil pedesaan dengan dibantu para kader.

b. Masih Banyaknya kekerasan pada perempuan dan anak

Anak adalah calon pemimpin bangsa sedangkan perempuan adalah guru pertama bagi calon generasi bangsa. Namun kekerasan pada perempuan dan anak masih banyak terjadi, hal ini dikarenakan masih kurangnya pemahaman hukum dalam kesetaraan dan keadilan gender di masyarakat Kota Probolinggo. Oleh karenanya Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Probolinggo melaksanakan sosialisasi, dan pendampingan bagi korban kekerasan serta pendampingan lingkungan korban kekerasan karena kekerasan terjadi bukan hanya disebabkan dari factor pelaku, namun kondisi dari lingkungan pelaku maupun korban. Salah satu upaya yang dilakukan adalah menciptakan dan mewujudkan Probolinggo Kota Layak Anak serta mengoptimalkan fungsi UPT Penanganan Korban Kekerasan.

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Rancangan awal yang telah disusun pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Probolinggo membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan yang ada.

Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2022 Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Probolinggo Tahun 2022 terlihat pada Tabel berikut:

REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2022
KOTA PROBOLINGGO

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp 000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp 000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	SOSIAL										
1	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL		Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi sosial			PROGRAM REHABILITASI SOSIAL		Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi sosial			
	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Kota Probolinggo	Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial yang mendapatkan Rehabilitasi Sosial Dasar		Rp 1.656.250.000	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Kota Probolinggo	Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial yang mendapatkan Rehabilitasi Sosial Dasar		Rp 1.656.250.000	
	Penyediaan Permakanan	Kota Probolinggo	Jumlah Penerima Bantuan Sosial Permakanan pada Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	265	Rp 1.200.000.000	Penyediaan Permakanan	Kota Probolinggo	Jumlah Penerima Bantuan Sosial Permakanan pada Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	265	Rp 1.200.000.000	

Penyediaan Alat Bantu	Kota Probolinggo	Jumlah Penerima Bantuan Sosial Alat Bantu pada Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	30	Rp 290.000.000	Penyediaan Alat Bantu	Kota Probolinggo	Jumlah Penerima Bantuan Sosial Alat Bantu pada Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	30	Rp 290.000.000	
Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial (DBH-CHT)	Kota Probolinggo	Jumlah Peserta yang mendapatkan Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial pada Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	35	Rp 166.250.000	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial (DBH-CHT)	Kota Probolinggo	Jumlah Peserta yang mendapatkan Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial pada Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	35	Rp 166.250.000	
Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/Aids dan Napza di Luar Panti Sosial		Presentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Lainnya Bukan Korban HIV/Aids dan Napza di Luar Panti Sosial yang mendapatkan Rehabilitasi Sosial			Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/Aids dan Napza di Luar Panti Sosial		Presentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Lainnya Bukan Korban HIV/Aids dan Napza di Luar Panti Sosial yang mendapatkan Rehabilitasi Sosial			
Penyediaan Permakanan	Kota Probolinggo	Jumlah Penerima Bantuan Sosial Permakanan pada Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Lainnya Bukan Korban HIV/Aids dan Napza di Luar Panti Sosial	250	Rp 300.000.000	Penyediaan Permakanan	Kota Probolinggo	Jumlah Penerima Bantuan Sosial Permakanan pada Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Lainnya Bukan Korban HIV/Aids dan Napza di Luar Panti Sosial	250	Rp 300.000.000	
Penyediaan Sandang	Kota Probolinggo	Jumlah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Lainnya Bukan Korban HIV/Aids dan Napza di Luar Panti Sosial yang mendapatkan Penyediaan Sandang	120	Rp 185.318.280	Penyediaan Sandang	Kota Probolinggo	Jumlah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Lainnya Bukan Korban HIV/Aids dan Napza di Luar Panti Sosial yang mendapatkan Penyediaan Sandang	120	Rp 185.318.280	

	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga PMKS Lainnya bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA (BK PROV)	Kota Probolinggo	Jumlah Peserta yang mendapatkan Bimbingan Sosial pada Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Lainnya Bukan Korban HIV/Aids dan Napza di Luar Panti Sosial	15	Rp 63.750.000	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga PMKS Lainnya bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA (BK PROV)	Kota Probolinggo	Jumlah Peserta yang mendapatkan Bimbingan Sosial pada Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Lainnya Bukan Korban HIV/Aids dan Napza di Luar Panti Sosial	15	Rp 63.750.000
	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial (DBH-CHT)	Kota Probolinggo	Jumlah Peserta yang mendapatkan Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial pada Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Lainnya Bukan Korban HIV/Aids dan Napza di Luar Panti Sosial	30	Rp 142.500.000	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial (DBH-CHT)	Kota Probolinggo	Jumlah Peserta yang mendapatkan Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial pada Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Lainnya Bukan Korban HIV/Aids dan Napza di Luar Panti Sosial	30	Rp 142.500.000
	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Kota Probolinggo	Jumlah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Lainnya Bukan Korban HIV/Aids dan Napza di Luar Panti Sosial yang mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga	10	Rp 25.000.000	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Kota Probolinggo	Jumlah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Lainnya Bukan Korban HIV/Aids dan Napza di Luar Panti Sosial yang mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga	10	Rp 25.000.000
2	PROGRAM PENANGANAN BENCANA		Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang mendapatkan Penanganan Bencana			PROGRAM PENANGANAN BENCANA		Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang mendapatkan Penanganan Bencana		
	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/ Kota		Jumlah Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/ Kota	7		Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/ Kota		Jumlah Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/ Kota	7	

	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Kota Probolinggo	Jumlah SDM yang mengikuti Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	250	Rp 120.313.680	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Kota Probolinggo	Jumlah SDM yang mengikuti Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	250	Rp 120.313.680	
3	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL		Presentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial			PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL		Presentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial			
	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah masyarakat miskin yang mendapatkan layanan pengentasan kemiskinan			Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah masyarakat miskin yang mendapatkan layanan pengentasan kemiskinan			
	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Kota Probolinggo	Jumlah Penerima Bantuan Sosial Kesejahteraan Sosial yang difasilitasi	500	Rp 754.900.860	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Kota Probolinggo	Jumlah Penerima Bantuan Sosial Kesejahteraan Sosial yang difasilitasi	500	Rp 754.900.860	
	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Kota Probolinggo	Jumlah Penerima Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat yang difasilitasi	100	Rp 350.000.000	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Kota Probolinggo	Jumlah Penerima Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat yang difasilitasi	100	Rp 350.000.000	
	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Kota Probolinggo	Persentase kegiatan pengelolaan data Fakir Miskin yang terlaksana	75	Rp 326.080.000	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Kota Probolinggo	Persentase kegiatan pengelolaan data Fakir Miskin yang terlaksana	75	Rp 326.080.000	

4	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL		Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang mendapatkan Upaya Pemberdayaan Sosial			PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL		Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang mendapatkan Upaya Pemberdayaan Sosial		
	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/ Kota		Persentase Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/ Kota			Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/ Kota		Persentase Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/ Kota		
	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Probolinggo	Jumlah Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial masyarakat yang mendapatkan peningkatan kemampuan	200	Rp 200.000.000	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Probolinggo	Jumlah Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial masyarakat yang mendapatkan peningkatan kemampuan	200	Rp 200.000.000
	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	Kota Probolinggo	Presentase Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	80	Rp 33.684.000	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	Kota Probolinggo	Presentase Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	80	Rp 33.684.000
5	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN		Presentase Kegiatan Pelestarian Nilai-Nilai Kepahlawanan dan Kesetiakawanan Sosial			PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN		Presentase Kegiatan Pelestarian Nilai-Nilai Kepahlawanan dan Kesetiakawanan Sosial		
	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota		Jumlah kegiatan pelestarian nilai-nilai kepahlawanan dan kesetiakawanan sosial			Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota		Jumlah kegiatan pelestarian nilai-nilai kepahlawanan dan kesetiakawanan sosial		

	Rehabilitasi Sarana Dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Kota Probolinggo	Persentase Sarana Dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional yang direhabilitasi	100	Rp 25.000.000	Rehabilitasi Sarana Dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Kota Probolinggo	Persentase Sarana Dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional yang direhabilitasi	100	Rp 25.000.000	
	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Kota Probolinggo	Jumlah Taman Makam Pahlawan yang dipelihara	1	Rp 100.000.000	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Kota Probolinggo	Jumlah Taman Makam Pahlawan yang dipelihara	1	Rp 100.000.000	
	Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Kota Probolinggo	Jumlah Kegiatan Pengamanan Taman Makam Pahlawan	2	Rp 180.000.000	Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Kota Probolinggo	Jumlah Kegiatan Pengamanan Taman Makam Pahlawan	2	Rp 180.000.000	
	PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK										
6	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN		Jumlah Peningkatan Peran Serta Kelompok Masyarakat dan Perangkat Daerah dalam Pengarusutamaan Gender (PUG)	67		PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN		Jumlah Peningkatan Peran Serta Kelompok Masyarakat dan Perangkat Daerah dalam Pengarusutamaan Gender (PUG)	67		
	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah Kegiatan dalam Peningkatan Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan	7		Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah Kegiatan dalam Peningkatan Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan	7		

	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi		Jumlah perempuan yang mendapatkan fasilitas peningkatan kapasitas ekonomi, hukum, politik, sosial, dan organisasi kemasyarakatan	125 Org	Rp 65.544.000	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Kota Probolinggo	Jumlah perempuan yang mendapatkan fasilitas peningkatan kapasitas ekonomi, hukum, politik, sosial, dan organisasi kemasyarakatan	125 Org	Rp 65.544.000	
	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi		Persentase keterlibatan perempuan dalam pemerintahan, lembaga swasta, politik, dan organisasi kemasyarakatan	0,026	Rp 244.042.752	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Kota Probolinggo	Persentase keterlibatan perempuan dalam pemerintahan, lembaga swasta, politik, dan organisasi kemasyarakatan	0,026	Rp 244.042.752	
	Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah program dan kegiatan pemerintah daerah yang dilengkapi dokumen ARG yang berkualitas			Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Probolinggo	Jumlah program dan kegiatan pemerintah daerah yang dilengkapi dokumen ARG yang berkualitas			
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota		Persentase Anggaran yang Responsif Gender (ARG) pada Belanja Langsung APBD	70	Rp 52.680.000	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Probolinggo	Persentase Anggaran yang Responsif Gender (ARG) pada Belanja Langsung APBD	70	Rp 52.680.000	
	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG		Jumlah SDM perencana yang terampil dalam PUG dan PPRG	275	Rp 100.000.000	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Kota Probolinggo	Jumlah SDM perencana yang terampil dalam PUG dan PPRG	275	Rp 100.000.000	
7	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA		Jumlah Perempuan yang berpartisipasi dalam Peningkatan Kualitas Keluarga	110		PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA		Jumlah Perempuan yang berpartisipasi dalam Peningkatan Kualitas Keluarga	110		

	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Kegiatan dalam Peningkatan Kualitas Keluarga dalam mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak	5		Peningkatan Kualitas Keluarga dalam mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Kegiatan dalam Peningkatan Kualitas Keluarga dalam mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak	5	
	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota (DBH-CHT)		Jumlah perempuan yang mendapatkan fasilitasi peningkatan kapasitas ekonomi	110	Rp 193.497.000	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota (DBH-CHT)	Kota Probolinggo	Jumlah perempuan yang mendapatkan fasilitasi peningkatan kapasitas ekonomi	110	Rp 193.497.000
8	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK		Jumlah Kegiatan Forum / Kelompok Kerja yang memiliki DataTerpilah			PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK		Jumlah Kegiatan Forum / Kelompok Kerja yang memiliki DataTerpilah		
	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/kota		Jumlah Kegiatan dalam Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data	5		Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/kota		Jumlah Kegiatan dalam Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data	5	
	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah ketersediaan data gender dan anak	9	Rp 30.000.000	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Probolinggo	Jumlah ketersediaan data gender dan anak	9	Rp 30.000.000

	Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah Data Gender dan Anak yang disajikan	2	Rp 35.000.000	Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Probolinggo	Jumlah Data Gender dan Anak yang disajikan	2	Rp 35.000.000	
9	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN		Persentase efektifitas P2TP2A dalam penanganan permasalahan perempuan			PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN		Persentase efektifitas P2TP2A dalam penanganan permasalahan perempuan			
	Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten Kota		Persentase Kasus kekerasan terhadap perempuan yang ditangani dan diselesaikan	100		Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten Kota		Persentase Kasus kekerasan terhadap perempuan yang ditangani dan diselesaikan	100		
	Advokasi kebijakan dan pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten Kota		Jumlah Pendamping Kasus Kekerasan dan Pekerja Perempuan yang mendapatkan Perlindungan	4	Rp 20.000.000	Advokasi kebijakan dan pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten Kota	Kota Probolinggo	Jumlah Pendamping Kasus Kekerasan dan Pekerja Perempuan yang mendapatkan Perlindungan	4	Rp 20.000.000	
	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota		Persentase Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Rujukan Lanjutan	100		Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Probolinggo	Persentase Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Rujukan Lanjutan	100		
	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah SDM Layanan Pengaduan Kasus Kekerasan Perempuan pada P2TP2A	3	Rp 37.000.000	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Probolinggo	Jumlah SDM Layanan Pengaduan Kasus Kekerasan Perempuan pada P2TP2A	3	Rp 37.000.000	

	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah Kegiatan dalam penanganan kekerasan terhadap perempuan	3	Rp 70.000.000	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Probolinggo	Jumlah Kegiatan dalam penanganan kekerasan terhadap perempuan	3	Rp 70.000.000	
	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Persentase penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan serta jejaringnya dan persentase kasus perempuan yang mendapat pengawasan dan perlindungan	100		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kota Probolinggo	Persentase penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan serta jejaringnya dan persentase kasus perempuan yang mendapat pengawasan dan perlindungan	100		
	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota		Efektifitas P2TP2A dalam penanganan permasalahan Perempuan dan Anak	41	Rp 30.000.000	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Probolinggo	Efektifitas P2TP2A dalam penanganan permasalahan Perempuan dan Anak	41	Rp 30.000.000	
	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah Kegiatan Jejaring yang Berperan dalam Penanganan Permasalahan Perempuan	4	Rp 22.000.000	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Probolinggo	Jumlah Kegiatan Jejaring yang Berperan dalam Penanganan Permasalahan Perempuan	4	Rp 22.000.000	
10	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)		Persentase pencapaian indikator Kota Layak Anak	70		PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Kota Probolinggo	Persentase pencapaian indikator Kota Layak Anak	70		

Pelebagaan PHA pada lembaga pemerintah, non pemerintah, dan dunia usaha kewenangan kabupaten/ kota		Persentase kelurahan yang memiliki Kampung Ramah Anak	70		Pelebagaan PHA pada lembaga pemerintah, non pemerintah, dan dunia usaha kewenangan kabupaten/ kota	Kota Probolinggo	Persentase kelurahan yang memiliki Kampung Ramah Anak	70		
Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah kampung ramah anak	25	Rp 195.000.000	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Probolinggo	Jumlah kampung ramah anak	25	Rp 195.000.000	
Koordinasi dan Sinkronisasi Pelebagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah Forum Anak	34	Rp 175.000.000	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelebagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Probolinggo	Jumlah Forum Anak	34	Rp 175.000.000	
Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten / Kota		Persentase kelurahan, kecamatan layak anak	70		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten / Kota	Kota Probolinggo	Persentase kelurahan, kecamatan layak anak	70		
Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten Kota		Jumlah Kelurahan dan Kecamatan Layak Anak	25	Rp 175.000.000	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten Kota	Kota Probolinggo	Jumlah Kelurahan dan Kecamatan Layak Anak	25	Rp 175.000.000	

	Pengembangan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak-anak Tingkat Daerah Kabupaten / Kota		Jumlah Kegiatan yang dilaksanakan dalam Pemenuhan Hak Anak	3	Rp 100.000.000	Pengembangan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak-anak Tingkat Daerah Kabupaten / Kota	Kota Probolinggo	Jumlah Kegiatan yang dilaksanakan dalam Pemenuhan Hak Anak	3	Rp 100.000.000	
	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kab/Kota		Jumlah PATBM	34	Rp 142.540.000	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kab/Kota	Kota Probolinggo	Jumlah PATBM	34	Rp 142.540.000	
1	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK		Persentase efektifitas P2TP2A dalam penanganan permasalahan anak			PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK		Persentase efektifitas P2TP2A dalam penanganan permasalahan anak			
	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota		Persentase penanganan kasus kekerasan terhadap anak yang mendapat pengawasan dan perlindungan	100		Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota		Persentase penanganan kasus kekerasan terhadap anak yang mendapat pengawasan dan perlindungan	100		
	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah anggota tim pos cinta	40	Rp 40.000.000	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Probolinggo	Jumlah anggota tim pos cinta	40	Rp 40.000.000	

	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten Kota		Persentase Anak Korban Kekerasan dan pekerja anak yang memerlukan perlindungan khusus	100		Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten Kota	Kota Probolinggo	Persentase Anak Korban Kekerasan dan pekerja anak yang memerlukan perlindungan khusus	100		
	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Daerah Kab/Kota		Jumlah Pendamping Kasus Kekerasan dan Pekerja Anak yang mendapatkan Perlindungan	4	Rp 20.000.000	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Daerah Kab/Kota	Kota Probolinggo	Jumlah Pendamping Kasus Kekerasan dan Pekerja Anak yang mendapatkan Perlindungan	4	Rp 20.000.000	
	Pengembangan Komunikasi, informasi dan Edukasi Anak yang memerlukan perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pekerja Anak	3	Rp 100.000.000	Pengembangan Komunikasi, informasi dan Edukasi Anak yang memerlukan perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Probolinggo	Jumlah kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pekerja Anak	3	Rp 100.000.000	
	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT										
1 2	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT, DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT					PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT, DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT					

Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial yang berpartisipasi dalam upaya pemberdayaan masyarakat			Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial yang berpartisipasi dalam upaya pemberdayaan masyarakat			
Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat		Jumlah Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial yang berpartisipasi dalam upaya pemberdayaan masyarakat	250	Rp 145.590.000	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Kota Probolinggo	Jumlah Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial yang berpartisipasi dalam upaya pemberdayaan masyarakat	250	Rp 145.590.000	

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Perencanaan pembangunan daerah di Kota Probolinggo membuka akses yang luas kepada masyarakat dalam memberikan usulan pembangunan di daerahnya melalui mekanisme musrenbang. Sistem perencanaan tersebut dilaksanakan secara berjenjang dari level terbawah sampai tingkat kota. Berdasarkan hasil musrenbang tingkat Kecamatan yang sudah dilaksanakan pada awal tahun 2021, tidak terdapat usulan kegiatan yang diusulkan masyarakat melalui Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Probolinggo dengan usulan dari kecamatan. Namun ada beberapa usulan dari hasil musrenbang kecamatan yaitu Non Pagu Indikatif Kecamatan yang merupakan program kegiatan rutin yang dilakukan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yaitu pengusulan Peralatan tidur, kursi roda, rantang sehat bagi lansia terlantar dan Pendampingan Forum Anak kecamatan.

USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN DARI PARA PEMANGKU KEPENTINGAN TAHUN 2022 DINAS SOSIAL, PPPA KOTA PROBOLINGGO

N O	PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	BESARAN/ VOLUME	CATATAN
1	2	3	4	5	6
	SOSIAL				
1	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL		Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi sosial		
	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial		Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial yang mendapatkan Rehabilitasi Sosial Dasar		Rp 1.656.250.000
	Penyediaan Permakanan	Kota Probolinggo	Jumlah Penerima Bantuan Sosial Permakanan pada Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	265	Rp 1.200.000.000
	Penyediaan Alat Bantu	Kota Probolinggo	Jumlah Penerima Bantuan Sosial Alat Bantu pada Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	30	Rp 290.000.000
	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial (DBH-CHT)	Kota Probolinggo	Jumlah Peserta yang mendapatkan Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial pada Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	35	Rp 166.250.000
	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/Aids dan Napza di Luar Panti Sosial		Presentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Lainnya Bukan Korban HIV/Aids dan Napza di Luar Panti Sosial yang mendapatkan Rehabilitasi Sosial		
	Penyediaan Permakanan	Kota Probolinggo	Jumlah Penerima Bantuan Sosial Permakanan pada Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Lainnya Bukan Korban HIV/Aids dan Napza di Luar Panti Sosial	250	Rp 300.000.000

	Penyediaan Sandang	Kota Probolinggo	Jumlah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Lainnya Bukan Korban HIV/Aids dan Napza di Luar Panti Sosial yang mendapatkan Penyediaan Sandang	120	Rp 185.318.280
	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga PMKS Lainnya bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA (BK PROV)	Kota Probolinggo	Jumlah Peserta yang mendapatkan Bimbingan Sosial pada Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Lainnya Bukan Korban HIV/Aids dan Napza di Luar Panti Sosial	15	Rp 63.750.000
	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial (DBH-CHT)	Kota Probolinggo	Jumlah Peserta yang mendapatkan Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial pada Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Lainnya Bukan Korban HIV/Aids dan Napza di Luar Panti Sosial	30	Rp 142.500.000
	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Kota Probolinggo	Jumlah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Lainnya Bukan Korban HIV/Aids dan Napza di Luar Panti Sosial yang mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga	10	Rp 25.000.000
2	PROGRAM PENANGANAN BENCANA		Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang mendapatkan Penanganan Bencana		
	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/ Kota		Jumlah Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/ Kota	7	
	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Kota Probolinggo	Jumlah SDM yang mengikuti Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	250	Rp 120.313.680
3	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL		Presentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial		
	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah masyarakat miskin yang mendapatkan layanan pengentasan kemiskinan		
	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Kota Probolinggo	Jumlah Penerima Bantuan Sosial Kesejahteraan Sosial yang difasilitasi	500	Rp 754.900.860
	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Kota Probolinggo	Jumlah Penerima Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat yang difasilitasi	100	Rp 350.000.000
	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Kota Probolinggo	Persentase kegiatan pengelolaan data Fakir Miskin yang terlaksana	75	Rp 326.080.000
4	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL		Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang mendapatkan Upaya Pemberdayaan Sosial		
	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/ Kota		Persentase Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/ Kota		
	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Probolinggo	Jumlah Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial masyarakat yang mendapatkan peningkatan kemampuan	200	Rp 200.000.000

	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	Kota Probolinggo	Presentase Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	80	Rp 33.684.000
5	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN		Presentase Kegiatan Pelestarian Nilai-Nilai Kepahlawanan dan Kesetiakawanan Sosial		
	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota		Jumlah kegiatan pelestarian nilai-nilai kepahlawanan dan kesetiakawanan sosial		
	Rehabilitasi Sarana Dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Kota Probolinggo	Persentase Sarana Dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional yang direhabilitasi	100	Rp 25.000.000
	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Kota Probolinggo	Jumlah Taman Makam Pahlawan yang dipelihara	1	Rp 100.000.000
	Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Kota Probolinggo	Jumlah Kegiatan Pengamanan Taman Makam Pahlawan	2	Rp 180.000.000
	PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK				
6	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN		Jumlah Peningkatan Peran Serta Kelompok Masyarakat dan Perangkat Daerah dalam Pengarusutamaan Gender (PUG)	67	
	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah Kegiatan dalam Peningkatan Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan	7	
	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Kota Probolinggo	Jumlah perempuan yang mendapatkan fasilitasi peningkatan kapasitas ekonomi, hukum, politik, sosial, dan organisasi kemasyarakatan	125 Org	Rp 65.544.000
	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Kota Probolinggo	Persentase keterlibatan perempuan dalam pemerintahan, lembaga swasta, politik, dan organisasi kemasyarakatan	0,026	Rp 244.042.752
	Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Probolinggo	Jumlah program dan kegiatan pemerintah daerah yang dilengkapi dokumen ARG yang berkualitas		
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Probolinggo	Persentase Anggaran yang Responsif Gender (ARG) pada Belanja Langsung APBD	70	Rp 52.680.000
	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Kota Probolinggo	Jumlah SDM perencana yang terampil dalam PUG dan PPRG	275	Rp 100.000.000
7	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA		Jumlah Perempuan yang berpartisipasi dalam Peningkatan Kualitas Keluarga	110	

	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Kegiatan dalam Peningkatan Kualitas Keluarga dalam mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak	5	
	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota (DBH-CHT)	Kota Probolinggo	Jumlah perempuan yang mendapatkan fasilitasi peningkatan kapasitas ekonomi	110	Rp 193.497.000
8	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK		Jumlah Kegiatan Forum / Kelompok Kerja yang memiliki Data Terpilah		
	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/kota		Jumlah Kegiatan dalam Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data	5	
	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Probolinggo	Jumlah ketersediaan data gender dan anak	9	Rp 30.000.000
	Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Probolinggo	Jumlah Data Gender dan Anak yang disajikan	2	Rp 35.000.000
9	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN		Persentase efektifitas P2TP2A dalam penanganan permasalahan perempuan		
	Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten Kota		Persentase Kasus kekerasan terhadap perempuan yang ditangani dan diselesaikan	100	
	Advokasi kebijakan dan pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten Kota	Kota Probolinggo	Jumlah Pendamping Kasus Kekerasan dan Pekerja Perempuan yang mendapatkan Perlindungan	4	Rp 20.000.000
	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Probolinggo	Persentase Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Rujukan Lanjutan	100	
	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Probolinggo	Jumlah SDM Layanan Pengaduan Kasus Kekerasan Perempuan pada P2TP2A	3	Rp 37.000.000
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Probolinggo	Jumlah Kegiatan dalam penanganan kekerasan terhadap perempuan	3	Rp 70.000.000
	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kota Probolinggo	Persentase penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan serta jejaringnya dan persentase kasus perempuan yang mendapat pengawasan dan perlindungan	100	
	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Probolinggo	Efektifitas P2TP2A dalam penanganan permasalahan Perempuan dan Anak	41	Rp 30.000.000
	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Probolinggo	Jumlah Kegiatan Jejaring yang Berperan dalam Penanganan Permasalahan Perempuan	4	Rp 22.000.000

10	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)		Persentase pencapaian indikator Kota Layak Anak	70	
	Pelebagaan PHA pada lembaga pemerintah, non pemerintah, dan dunia usaha kewenangan kabupaten/ kota		Persentase kelurahan yang memiliki Kampung Ramah Anak	70	
	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Probolinggo	Jumlah kampung ramah anak	25	Rp 195.000.000
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelebagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Probolinggo	Jumlah Forum Anak	34	Rp 175.000.000
	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten / Kota	Kota Probolinggo	Persentase kelurahan, kecamatan layak anak	70	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten Kota	Kota Probolinggo	Jumlah Kelurahan dan Kecamatan Layak Anak	25	Rp 175.000.000
	Pengembangan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak-anak Tingkat Daerah Kabupaten / Kota	Kota Probolinggo	Jumlah Kegiatan yang dilaksanakan dalam Pemenuhan Hak Anak	3	Rp 100.000.000
	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kab/Kota	Kota Probolinggo	Jumlah PATBM	34	Rp 142.540.000
11	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK		Persentase efektifitas P2TP2A dalam penanganan permasalahan anak		
	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota		Persentase penanganan kasus kekerasan terhadap anak yang mendapat pengawasan dan perlindungan	100	
	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Probolinggo	Jumlah anggota tim pos cinta	40	Rp 40.000.000
	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten Kota	Kota Probolinggo	Persentase Anak Korban Kekerasan dan pekerja anak yang memerlukan perlindungan khusus	100	
	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Daerah Kab/Kota	Kota Probolinggo	Jumlah Pendamping Kasus Kekerasan dan Pekerja Anak yang mendapatkan Perlindungan	4	Rp 20.000.000
	Pengembangan Komunikasi, informasi dan Edukasi Anak yang memerlukan perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Probolinggo	Jumlah kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pekerja Anak	3	Rp 100.000.000

	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT				
12	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT, DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT				
	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial yang berpartisipasi dalam upaya pemberdayaan masyarakat		
	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Kota Probolinggo	Jumlah Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial yang berpartisipasi dalam upaya pemberdayaan masyarakat	250	Rp 145.590.000

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN, PROGRAM, DAN KEGIATAN

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Berdasarkan pada prinsip penyelenggaraan otonomi daerah yang seyogyanya harus selalu berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan selalu memperhatikan kepentingan dan aspirasi yang tumbuh dalam masyarakat. Pemerintah telah menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 sebagai pedoman pembangunan negara dalam kurun waktu tersebut. RPJMN merupakan penjabaran dari visi, misi dan program presiden. Dengan mempertimbangkan masalah pokok bangsa, tantangan pembangunan yang dihadapi dan capaian pembangunan selama ini, maka visi pembangunan nasional untuk tahun 2020-2024 adalah:

“ TERWUJUDNYA INDONESIA MAJU YANG BERDAULAT, MANDIRI, DAN BERKEPRIBADIAN BERLANDASKAN GOTONG-ROYONG”. Upaya untuk mewujudkan visi ini adalah melalui 9 Misi yaitu:

1. Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia;
2. Struktur Ekonomi yang Produktif, Merata dan Berdaya Saing;
3. Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan;
4. Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan;
5. Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa;
6. Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat dan Terpercaya;
7. Perlindungan Bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh Warga;
8. Pengelolaan Pemerintah yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya;
9. Sinergi Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan.

Penyelenggaraan kesejahteraan sosial merupakan salah satu prioritas pembangunan nasional sebagaimana diamanatkan oleh Undang Undang Dasar 1945 dan Undang - undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Yang dimaksud dengan penyelenggaraan kesejahteraan sosial ialah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara, yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial.

Tujuan penyelenggaraan kesejahteraan sosial menurut UU Nomor 11 Tahun 2009 sebagai berikut:

1. Meningkatkan taraf kesejahteraan, kualitas, dan kelangsungan hidup;
2. Memulihkan fungsi sosial dalam rangka mencapai kemandirian;
3. Meningkatkan ketahanan sosial masyarakat dalam mencegah dan menangani masalah kesejahteraan sosial;

4. Meningkatkan kemampuan, kepedulian dan tanggungjawab sosial dunia usaha dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara melembaga dan berkelanjutan;
5. Meningkatkan kemampuan dan kepedulian masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara melembaga dan berkelanjutan; dan
6. Meningkatkan kualitas manajemen penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

Penyelenggaraan kesejahteraan sosial diprioritaskan kepada mereka yang memiliki kehidupan yang tidak layak secara kemanusiaan dan memiliki kriteria masalah sosial sebagai berikut :

- a. Kemiskinan, yaitu kondisi sosial ekonomi masyarakat yang tidak mempunyai kemampuan dalam memenuhi kebutuhan pokok yang layak bagi kemanusiaan;
- b. Ketelantaran, yaitu pengabaian / penelantaran anak - anak dan orang lanjut usia karena berbagai sebab atau kondisi tidak terpenuhinya kebutuhan fisik, psikis, dan sosial secara wajar yang disebabkan oleh ketidakmampuan sosial ekonomi, dan pengabaian terhadap tugas dan tanggung jawab;
- c. Kecacatan, yaitu hilang/terganggunya fungsi fisik atau kondisi abnormalitas fungsi struktur anatomi psikologi maupun fisiologis;
- d. Keterpencilan, yaitu isolasi alam yang berakibat pada ketertinggalan yang dialami oleh komunitas adat terpencil atau kondisi kehidupan komunitas sosial budaya lokal yang tinggal pada lokasi yang terisolir secara geografis dan sulit terjangkau serta belum ada kontak(interaksi) dengan dunia luar;
- e. Ketunaan sosial dan penyimpangan perilaku, yaitu merupakan indikasi atas ketidakberhasilan fungsi sosial seseorang, yakni tergantungnya salah satu atau lebih fungsi yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan fisik, emosi, konsep diri dan juga kebutuhan religius, rekreasi dan pendidikan seseorang atau kondisi penyimpangan atau pelanggaran terhadap nilai dan norma sosial, moral, dan etika yang berlaku di masyarakat;
- f. Korban bencana, yaitu perorangan, keluarga, atau kelompok masyarakat yang menderita baik secara fisik, mental, maupun sosial ekonomi sebagai akibat dari terjadinya bencana yang menyebabkan mereka mengalami hambatan dalam melaksanakan tugas - tugas kehidupannya; dan/atau
- g. Korban tindak kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi, yaitu orang (baik individu, keluarga atau kelompok) yang mengalami tindak kekerasan, baik dalam bentuk penelantaran, perlakuan salah, eksploitasi, diskriminasi dan bentuk - bentuk kekerasan lainnya maupun orang yang berada dalam situasi yang membahayakan dirinya sehingga menyebabkan fungsi sosialnya terganggu

Penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang dilaksanakan oleh pemerintah maupun masyarakat meliputi:

- a. Rehabilitasi sosial, yaitu proses refungsionalisasi dan pengembangan untuk memungkinkan seseorang mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat.
- b. Jaminan sosial, yaitu skema yang melembaga untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
- c. Pemberdayaan sosial, yaitu semua upaya yang diarahkan untuk menjadikan warga negara yang mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.
- d. Perlindungan sosial, yaitu semua upaya yang diarahkan untuk mencegah dan menangani resiko dari guncangan dan kerentanan sosial

3.1.1 Telaah Renstra K/L

Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Probolinggo mengacu pada dua telaah Kementerian, yaitu Kementerian Sosial dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak. Telaah sarannya adalah sebagai berikut

Analisis ini dimaksudkan untuk menilai keserasian, keterpaduan, sinkronisasi, dan sinergitas pencapaian sasaran pelaksanaan Renstra SKPD terhadap sasaran Renstra K/L dan Renstra SKPD kabupaten/kota sesuai dengan urusan yang menjadi kewenangan masing-masing SKPD.

Renstra-KL memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi Kementerian/Lembaga yang disusun dengan berpedoman pada RPJM Nasional dan bersifat indikatif yang mengacu pada prioritas pembangunan Nasional dan pagu indikatif, serta memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Dari hasil review Renstra Kementerian Sosial, Renstra Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur dan Renstra Dinas Sosial Kabupaten/Kota, ditemukan beberapa kebijakan, strategi yang sinergis dan saling mendukung. Namun ada juga kebijakan yang belum mendapat dukungan dari salah satu di antara lembaga-lembaga tersebut meskipun sebenarnya secara umum sudah bersesuaian.

Strategi yang digunakan antara Kementerian Sosial, Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur dan Kabupaten/Kota juga ada beberapa di antaranya yang berbeda, meskipun ada beberapa strategi makro yang juga diikuti oleh Pemerintah Propinsi dan Kabupaten/Kota. Penggunaan strategi bergantung pada kondisi dan situasi daerah, permasalahan spesifik yang dihadapi dan kemampuan Sumber daya yang dimiliki. Di bawah ini disajikan matrik perbandingan kebijakan dan strategi penyelenggaraan kesejahteraan sosial antara Kementerian Sosial RI. Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur dan Dinas Sosial Kabupaten/Kota.

Sedangkan Telaah di Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah Sesuai dengan tugas dan fungsinya, perangkat daerah mendukung pencapaian tujuan

dan sasaran Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPA). Adapun tujuan dan sasaran (KPPA) yang terkait dengan pelayanan perangkat daerah adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kesetaraan gender dalam pembangunan

Sasaran yang ingin dicapai dari tujuan ke-1 adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatnya capaian indeks pembangunan gender
Capaian sasaran ini diukur dengan indikator kinerja utama (IKU): Indeks Pembangunan Gender (IPG)
- b. Meningkatnya capaian indeks pemberdayaan gender
Capaian sasaran ini diukur dengan indikator kinerja utama: Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)

2. Meningkatkan kualitas perlindungan hak perempuan

Sasaran yang ingin dicapai adalah sebagai berikut:

- a. Berkurangnya kasus kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO
 - 1) Capaian sasaran ini diukur dengan indikator kinerja utama: Prevalensi kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO; dan rasio kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO.
 - 2) Perbandingan antara jumlah kekerasan terhadap perempuan dibagi jumlah perempuan di atas 18 tahun.
- b. Meningkatnya kualitas penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO
Capaian sasaran ini diukur dengan indikator kinerja utama: Persentase kabupaten/kota yang memberikan layanan komprehensif sesuai standar kepada seluruh (100%) perempuan korban kekerasan.

3. Meningkatkan perlindungan terhadap Anak dan pemenuhan hak anak bagi semua anak, termasuk anak berkebutuhan khusus Sasaran yang ingin dicapai adalah sebagai berikut :

- a. *Meningkatnya kabupaten/kota yang mampu memenuhi hak anak*
Capaian sasaran ini diukur dengan indikator kinerja utama: Persentase kabupaten/kota Layak Anak;
- b. *Meningkatnya kualitas implementasi kebijakan terkait perlindungan khusus kepada anak*
Capaian sasaran ini diukur dengan indikator kinerja utama:
 - 1) Persentase anak yang membutuhkan perlindungan khusus yang memperoleh layanan sesuai dengan standar
 - 2) Persentase kabupaten/kota yang menindaklanjuti seluruh (100%) pengaduan kasus anak yang membutuhkan perlindungan khusus yang sesuai dengan standar.
- c. *Meningkatnya kualitas sistem layanan perlindungan khusus kepada anak*

Capaian sasaran ini diukur dengan indikator kinerja utama: Persentase lembaga penyedia layanan perlindungan khusus kepada anak yang mampu memberikan layanan komprehensif sesuai dengan standar

4. Meningkatkan partisipasi masyarakat dan sinergitas antar lembaga masyarakat dalam peningkatan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak

Sasaran yang ingin dicapai adalah sebagai berikut:

Meningkatnya partisipasi dan sinergitas lembaga profesi dan dunia usaha, media, dan organisasi agama dan kemasyarakatan serta akademisi dan lembaga riset dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Capaian sasaran ini diukur dengan indikator kinerja utama: Persentase Partisipasi Lembaga Masyarakat.

Dalam pendekatan telaah kedua kementerian, maka Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak kota Probolinggo mengambil Program kerja dari keduanya untuk diturunkan dan di sesuaikan sebagai acuan berikut :

Permasalahan Pelayanan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak berdasarkan Program K/L beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

Program Renstra K/L Kementerian Sosial	Permasalahan Pelayanan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Probolinggo	Faktor	
		Penghambat	Pendorong
Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Inventarisasi data dari desa dan kecamatan yang diajukan ke pusat, tidak diverifikasi sesuai data Usulan	kabupaten tidak Dapat mengintervensi keputusan verifikasi pusat	koordinasi dan Personil pendukung data serta system pedataan on line
Program Rehabilitasi Sosial	pmks yang lansia yang terlantar kebanyakan adalah lansia tidak produktif dimana panti tidak dapat menerima karena tidak sesuai dengan persyaratan panti	kabupaten tidak diperbolehkan memiliki panti Sendiri	Kerjasama Terkait Rehabilitasi
Program Pemberdayaan Sosial	Pelatihan bagi PMKS masih sebatas pelatihan ketrampilan, dan susah untuk memasarkan	Belum ada jalur pemasaran yang memadai	Adanya kelompok-kelompok usaha Bersama
Program Pemberdayaan Fakir Miskin	Bantuan yang turun tidak sama dengan data yang Diajukan	Verifikasi data dari pusat tidak dapat diubah atau lama jika Harus disesuaikan	Adanya petugas updating data sampai dengan Kecamatan

Kementerian PPPA			
Program Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Masyarakat masih belum sadar kesetaraan dan pemberdayaan gender	Kurang adanya transfer ilmu dari peserta yang Dilatih	Pengoptimalan forum gender di Opd
Program Perlindungan Anak	Hak anak di masyarakat belum terfasilitasi dengan baik	Masih adanya kekerasan anak	Program KLA
Program Partisipasi Lembaga Masyarakat dalam Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Kelembagaan perlindungan perempuan ada banyak, namun banyak anak broken home yang belum masuk dan ditangani lembaga	Penjangkauan yang susah	Adanya jejaring dengan mitra dan lsm

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis daerah dan permasalahan pembangunan daerah. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut.

Adapun Tujuan yang ingin dicapai Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Probolinggo adalah :

1. Meningkatkan Perlindungan, Jaminan dan Rehabilitasi Sosial;
2. Meningkatkan percepatan penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial terpadu lintas sektor;
3. Meningkatkan kualitas perlindungan anak dan perempuan serta penguatan pengarusutamaan gender dalam pembangunan

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Adapun Sasaran yang ingin dicapai Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Probolinggo adalah :

1. Terlaksananya Pendampingan dan Penyaluran Bantuan untuk warga miskin;
2. Meningkatnya penanganan penyandang masalah kesejahteraan social;
3. Menurunnya rasio kekerasan dalam rumah tangga

3.3 Program dan Kegiatan

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun				Catatan Penting	Perkiraan Maju	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
	SOSIAL								
	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi sosial							
	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial yang mendapatkan Rehabilitasi Sosial Dasar			Rp 1.656.250.000				
	Penyediaan Permakanan	Jumlah Penerima Bantuan Sosial Permakanan pada Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Kota Probolinggo	265	Rp 1.200.000.000	DAU		275	Rp 1.350.000.000
	Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Penerima Bantuan Sosial Alat Bantu pada Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Kota Probolinggo	30	Rp 290.000.000	DAU		30	Rp 300.000.000
	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial (DBH-CHT)	Jumlah Peserta yang mendapatkan Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial pada Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Kota Probolinggo	35	Rp 166.250.000	DBH-CHT		35	Rp 237.500.000

Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/Aids dan Napza di Luar Panti Sosial	Presentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Lainnya Bukan Korban HIV/Aids dan Napza di Luar Panti Sosial yang mendapatkan Rehabilitasi Sosial							
Penyediaan Permakanan	Jumlah Penerima Bantuan Sosial Permakanan pada Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Lainnya Bukan Korban HIV/Aids dan Napza di Luar Panti Sosial	Kota Probolinggo	250	Rp 300.000.000			300	Rp 360.000.000
Penyediaan Sandang	Jumlah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Lainnya Bukan Korban HIV/Aids dan Napza di Luar Panti Sosial yang mendapatkan Penyediaan Sandang	Kota Probolinggo	120	Rp 185.318.280	DAU		120	Rp 216.204.660
Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga PMKS Lainnya bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA (BK PROV)	Jumlah Peserta yang mendapatkan Bimbingan Sosial pada Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Lainnya Bukan Korban HIV/Aids dan Napza di Luar Panti Sosial	Kota Probolinggo	15	Rp 63.750.000	BK PROV		15	Rp 67.500.000
Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial (DBH-CHT)	Jumlah Peserta yang mendapatkan Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial pada Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Lainnya Bukan Korban HIV/Aids dan Napza di Luar Panti Sosial	Kota Probolinggo	30	Rp 142.500.000	DBH-CHT		30	Rp 160.000.000
Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Lainnya Bukan Korban HIV/Aids dan Napza di Luar Panti Sosial yang mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Kota Probolinggo	10	Rp 25.000.000	DAU		10	Rp 30.000.000

	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang mendapatkan Penanganan Bencana							
	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/ Kota	Jumlah Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/ Kota		7				7	
	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Jumlah SDM yang mengikuti Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Kota Probolinggo	250	Rp 120.313.680	DAU		270	Rp 140.365.960
	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Presentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial							
	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah masyarakat miskin yang mendapatkan layanan pengentasan kemiskinan							
	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Penerima Bantuan Sosial Kesejahteraan Sosial yang difasilitasi	Kota Probolinggo	500	Rp 754.900.860	DAU		550	Rp 905.717.670
	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Jumlah Penerima Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat yang difasilitasi	Kota Probolinggo	100	Rp 350.000.000	DAU		100	Rp 375.000.000
	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase kegiatan pengelolaan data Fakir Miskin yang terlaksana	Kota Probolinggo	75	Rp 326.080.000	DAU		78	Rp 388.760.000
	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang mendapatkan Upaya Pemberdayaan Sosial							

	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/ Kota							
	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial masyarakat yang mendapatkan peningkatan kemampuan	Kota Probolinggo	200	Rp 200.000.000	DAU		200	Rp 210.000.000
	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	Presentase Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	Kota Probolinggo	80	Rp 33.684.000	DAU		85	Rp 39.298.000
	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Presentase Kegiatan Pelestarian Nilai-Nilai Kepahlawanan dan Kesetiakawanan Sosial							
	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan pelestarian nilai-nilai kepahlawanan dan kesetiakawanan sosial							
	Rehabilitasi Sarana Dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Persentase Sarana Dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional yang direhabilitasi	Kota Probolinggo	100	Rp 25.000.000	DAU		100	Rp 25.000.000
	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Taman Makam Pahlawan yang dipelihara	Kota Probolinggo	1	Rp 100.000.000	DAU		1	Rp 120.000.000
	Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Pengamanan Taman Makam Pahlawan	Kota Probolinggo	2	Rp 180.000.000	DAU		2	Rp 200.000.000
	PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK								
	PROGRAM PENGARUSUTAM AAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Jumlah Peningkatan Peran Serta Kelompok Masyarakat dan Perangkat Daerah dalam Pengarusutamaan Gender (PUG)		67				68	

	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan dalam Peningkatan Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan		7				8	
	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah perempuan yang mendapatkan fasilitasi peningkatan kapasitas ekonomi, hukum, politik, sosial, dan organisasi kemasyarakatan	Kota Probolinggo	125 Org	Rp 65.544.000	DAU		150 Org	Rp 76.468.000
	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Persentase keterlibatan perempuan dalam pemerintahan, lembaga swasta, politik, dan organisasi kemasyarakatan	Kota Probolinggo	0,026	Rp 244.042.752	DAU		0,026	Rp 284.716.544
	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah program dan kegiatan pemerintah daerah yang dilengkapi dokumen ARG yang berkualitas							
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kabupaten/Kota	Persentase Anggaran yang Responsif Gender (ARG) pada Belanja Langsung APBD	Kota Probolinggo	70	Rp 52.680.000	DAU		75	Rp 44.180.000
	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Jumlah SDM perencana yang terampil dalam PUG dan PPRG	Kota Probolinggo	275	Rp 100.000.000	DAU		300	Rp 125.000.000
	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Jumlah Perempuan yang berpartisipasi dalam Peningkatan Kualitas Keluarga		110				115	
	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan dalam Peningkatan Kualitas Keluarga dalam mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak		5				5	

	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota (DBH-CHT)	Jumlah perempuan yang mendapatkan fasilitasi peningkatan kapasitas ekonomi	Kota Probolinggo	110	Rp 193.497.000	DBH-CHT		115	Rp 225.746.500
	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Jumlah Kegiatan Forum / Kelompok Kerja yang memiliki Data Terpilah							
	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/kota	Jumlah Kegiatan dalam Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data		5				5	
	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah ketersediaan data gender dan anak	Kota Probolinggo	9	Rp 30.000.000	DAU		9	Rp 45.000.000
	Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Data Gender dan Anak yang disajikan	Kota Probolinggo	2	Rp 35.000.000	DAU		2	Rp 55.000.000
	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Persentase efektifitas P2TP2A dalam penanganan permasalahan perempuan							
	Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten Kota	Persentase Kasus kekerasan terhadap perempuan yang ditangani dan diselesaikan		100				100	
	Advokasi kebijakan dan pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten Kota	Jumlah Pendamping Kasus Kekerasan dan Pekerja Perempuan yang mendapatkan Perlindungan	Kota Probolinggo	4	Rp 20.000.000	DAU		5	Rp 22.500.000
	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Rujukan Lanjutan	Kota Probolinggo	100				100	

	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah SDM Layanan Pengaduan Kasus Kekerasan Perempuan pada P2TP2A	Kota Probolinggo	3	Rp 37.000.000	DAU		4	Rp 40.000.000
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan dalam penanganan kekerasan terhadap perempuan	Kota Probolinggo	3	Rp 70.000.000	DAU		5	Rp 100.000.000
	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan serta jejaringnya dan persentase kasus perempuan yang mendapat pengawasan dan perlindungan	Kota Probolinggo	100				100	
	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Efektifitas P2TP2A dalam penanganan permasalahan Perempuan dan Anak	Kota Probolinggo	41	Rp 30.000.000	DAU		41	Rp 35.000.000
	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Jejaring yang Berperan dalam Penanganan Permasalahan Perempuan	Kota Probolinggo	4	Rp 22.000.000	DAU		8	Rp 30.000.000
	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Persentase pencapaian indikator Kota Layak Anak		70				80	
	Pelebagaan PHA pada lembaga pemerintah, non pemerintah, dan dunia usaha kewenangan kabupaten/ kota	Persentase kelurahan yang memiliki Kampung Ramah Anak		70				80	

	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah kampung ramah anak	Kota Probolinggo	25	Rp 195.000.000	DAU		27	Rp 205.000.000
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Forum Anak	Kota Probolinggo	34	Rp 175.000.000	DAU		34	Rp 200.000.000
	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten / Kota	Persentase kelurahan, kecamatan layak anak	Kota Probolinggo	70				80	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten Kota	Jumlah Kelurahan dan Kecamatan Layak Anak	Kota Probolinggo	25	Rp 175.000.000	DAU		29	Rp 200.000.000
	Pengembangan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak-anak Tingkat Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah Kegiatan yang dilaksanakan dalam Pemenuhan Hak Anak	Kota Probolinggo	3	Rp 100.000.000	DAU		4	Rp 150.000.000
	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kab/Kota	Jumlah PATBM	Kota Probolinggo	34	Rp 142.540.000	DAU		34	Rp 150.100.000
	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Persentase efektifitas P2TP2A dalam penanganan permasalahan anak							
	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penanganan kasus kekerasan terhadap anak yang mendapat pengawasan dan perlindungan		100				100	

	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah anggota tim pos cinta	Kota Probolinggo	40	Rp 40.000.000	DAU		40	Rp 45.000.000
	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten Kota	Persentase Anak Korban Kekerasan dan pekerja anak yang memerlukan perlindungan khusus	Kota Probolinggo	100				100	
	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Daerah Kab/Kota	Jumlah Pendamping Kasus Kekerasan dan Pekerja Anak yang mendapatkan Perlindungan	Kota Probolinggo	4	Rp 20.000.000	DAU		5	Rp 22.500.000
	Pengembangan Komunikasi, informasi dan Edukasi Anak yang memerlukan perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pekerja Anak	Kota Probolinggo	3	Rp 100.000.000	DAU		3	Rp 110.000.000
	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT								
	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT, DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT								

	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial yang berpartisipasi dalam upaya pemberdayaan masyarakat							
	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Jumlah Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial yang berpartisipasi dalam upaya pemberdayaan masyarakat	Kota Probolinggo	250	Rp 145.590.000	DAU		250	Rp 169.855.000

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Berikut daftar program dan kegiatan yang akan dilaksanakan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Probolinggo Tahun 2021 :

Kode	Urusan/Bidang/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja		2021	
		Tolak Ukur	Satuan	Target Kinerja	Anggaran
1	2	3	4	5	6
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				
	SOSIAL				
1.06.04.2.01	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Persentase Capaian Kinerja Program Minimal 80%	Persentase	85	Rp 972.972.000
1.06.04.2.01.01	Penyediaan Permakanan	Jumlah lanjut usia terlantar yang mendapatkan pelayanan dan rehabilitasi sosial	orang	50	Rp 728.000.000
1.06.04.2.01.05	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial (DBH-CHT)	Jumlah anak terlantar dan lanjut usia terlantar yang mendapatkan pelayanan dan rehabilitasi sosial	Orang	50	Rp 150.700.000
1.06.05.2.01.03	Pemantauan Terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar	Jumlah anak terlantar yang mendapatkan pelayanan dan rehabilitasi sosial	Orang	270	Rp 94.272.000
1.06.04.2.02	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/Aids dan Napza di Luar Panti Sosial	Jumlah penyandang disabilitas dan tuna sosial yang mendapatkan pelayanan dan rehabilitasi sosial			Rp
1.06.04.2.02.03	Penyediaan Permakanan	Jumlah penyandang disabilitas dan tuna sosial yang mendapatkan pelayanan dan rehabilitasi sosial	Orang	224	Rp 223.050.000
1.06.04.2.02.04	Penyediaan Sandang	Jumlah penyandang disabilitas dan tuna sosial yang mendapatkan pelayanan dan rehabilitasi sosial	Orang	120	Rp 154.431.900
1.06.04.2.02.08	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga PMKS Lainnya bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA (BK PROV)	Jumlah penyandang disabilitas dan tuna sosial yang mendapatkan pelayanan dan rehabilitasi sosial	Orang	10	Rp 50.000.000
1.06.04.2.02.07	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial (DBH-CHT)	Jumlah Disabilitas, Pemulung dan fakir miskin yang mendapatkan pelayanan dan rehabilitasi sosial	Orang	20	Rp 149.774.000
1.06.06.2.01	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/ Kota	Jumlah sasaran yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial			Rp
1.06.06.2.01.04	Penanganan Khusus Bagi Kelompok Rentan	Jumlah sasaran yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial	Orang	440	Rp 575.069.250

1.06.06.2.02	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/ Kota	Jumlah sasaran yang mendapatkan sosialisasi/pembinaan bencana berbasis masyarakat serta perlindungan dan jaminan sosial			Rp	103.061.400
1.06.06.2.02.02	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Jumlah Sasaran dari Jumlah sasaran yang mendapatkan sosialisasi/pembinaan bencana berbasis masyarakat serta perlindungan dan jaminan sosial	Orang	200	Rp	103.061.400
1.06.02.2.03	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah sasaran yang mendapatkan pembinaan dan advokasi LK3			Rp	30.870.000
1.06.02.2.03.05	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	Jumlah sasaran yang mendapatkan pembinaan dan advokasi LK3	Orang	60	Rp	30.870.000
1.06.05.2.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah masyarakat miskin yang mendapatkan layanan pengentasan kemiskinan			Rp	618.255.800
		Persentase kegiatan verbal yang terlaksana				
1.06.05.2.02.03	Fasilitasi Bantuan Sosial Keejahteraan Keluarga	Jumlah masyarakat miskin yang mendapatkan layanan pengentasan kemiskinan	orang	202	Rp	254.084.050
1.06.05.2.02.04	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Jumlah masyarakat miskin yang mendapatkan layanan pengentasan kemiskinan	orang	100	Rp	30.446.750
1.06.05.2.02.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase kegiatan verbal yang terlaksana	persen	100	Rp	333.725.000
1.06.02.2.03	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah sasaran dari orsos yang mendapatkan upaya-upaya pemberdayaan sosial			Rp	71.544.000
1.06.02.2.03.01	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah sasaran dari orsos yang mendapatkan upaya-upaya pemberdayaan sosial	lembaga	100	Rp	71.544.000
1.06.07.2.01	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan pelestarian nilai-nilai kepahlawanan dan kesetiakawanan sosial			Rp	99.305.250
1.06.07.2.01.01	Rehabilitasi Sarana Dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan pelestarian nilai-nilai kepahlawanan dan kesetiakawanan sosial	kegiatan	2	.Rp	14.996.250

1.06.07.2.01.02	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan pelestarian nilai-nilai kepahlawanan dan kesetiakawanan sosial	orang	3	Rp	66.309.000
1.06.07.2.01.03	Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan pelestarian nilai-nilai kepahlawanan dan kesetiakawanan sosial	orang	2	Rp	18.000.000
URUSAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK						
2.08.02.2.02	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah perempuan yang mendapatkan fasilitasi peningkatan kapasitas ekonomi, hukum, politik, sosial, dan organisasi kemasyarakatan				
2.08.02.2.02.01	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah perempuan yang mendapatkan fasilitasi peningkatan kapasitas ekonomi, hukum, politik, sosial, dan organisasi kemasyarakatan	orang	100	Rp	60.220.000
2.08.02.2.02.02	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Persentase keterlibatan perempuan dalam pemerintahan, lembaga swasta, politik, dan organisasi kemasyarakatan	Persen	41	Rp	208.968.960
2.08.04.2.01	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah perempuan yang mendapatkan fasilitasi peningkatan kapasitas ekonomi			Rp	161.247.500
2.08.04.2.01.03	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota (DBH-CHT)	Jumlah perempuan yang mendapatkan fasilitasi peningkatan kapasitas ekonomi	orang	104	Rp	161.247.500
2.08.02.2.01	Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah program dan kegiatan pemerintah daerah yang dilengkapi dokumen ARG yang berkualitas			Rp	124.921.750
2.08.02.2.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG	Jumlah program dan kegiatan pemerintah daerah yang dilengkapi dokumen ARG yang berkualitas	Kebijakan	6	.Rp	29.500.000
2.08.02.2.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah program dan kegiatan pemerintah daerah yang dilengkapi dokumen ARG yang berkualitas	kegiatan	2	Rp	14.400.000
2.08.02.2.01.03	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Jumlah program dan kegiatan pemerintah daerah yang dilengkapi dokumen ARG yang berkualitas	Dokumen	250	Rp	27.160.000

2.08.02.2.01.04	Sosialisasi kebijakan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Jumlah program dan kegiatan pemerintah daerah yang dilengkapi dokumen ARG yang berkualitas	orang	100	Rp 53.861.750
2.08.05.2.01	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/kota	Jumlah ketersediaan data gender dan anak			Rp 17.090.000
2.08.05.2.01.01	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah ketersediaan data gender dan anak	OPD	28	Rp 8.250.000
2.08.05.2.01.02	Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah ketersediaan data gender dan anak	profil	40	Rp 8.840.000
2.08.03.2.02	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase kekerasan terhadap perempuan dan anak yang ditangani dan diselesaikan			Rp 44.500.000
2.08.03.2.02.01	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase kekerasan terhadap perempuan dan anak yang ditangani dan diselesaikan	Persen	100	Rp 36.000.000
2.08.03.2.02.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase kekerasan terhadap perempuan dan anak yang ditangani dan diselesaikan	Persen	100	Rp 8.500.000
2.08.03.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak serta jejaringnya dan persentase kasus perempuan dan anak yang mendapat pengawasan dan perlindungan			
2.08.03.2.03.02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase kekerasan terhadap perempuan dan anak yang ditangani dan diselesaikan	Persen	100	Rp 14.250.000
2.08.03.2.03.04	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase jejaring yang berperan dalam penanganan permasalahan perempuan dan anak	Persen	25	Rp 16.912.000
2.08.07.2.01	Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah kecamatan dan kelurahan layak anak yang diinisiasi			Rp 58.200.000

2.08.07.2.01.01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah kampung ramah anak	persen	25	Rp 30.800.000
2.08.06.2.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah kecamatan layak anak dan kelurahan layak anak yang diinisiasi	kelurahan	5	Rp 27.400.000
2.08.07.2.02	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kampung ramah anak, forum anak, PATBM yang dibina dan Hari Anak Nasional			Rp 69.692.310
2.08.07.2.02.03	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah pembinaan forum anak	Forum anak	1	Rp 11.000.000
2.08.07.2.02.04	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah PATBM	Kelurahan	29	Rp 58.692.310
	URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT				
2.13.05.2.01	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial yang berpartisipasi dalam upaya pemberdayaan masyarakat			Rp 126.925.000
2.13.05.2.01.07	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Jumlah Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial yang berpartisipasi dalam upaya pemberdayaan masyarakat	Orang	225	Rp 126.925.000
		Total			Rp

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Probolinggo yang selanjutnya disingkat Renja OPD adalah dokumen perencanaan OPD untuk periode 1 (satu) tahun. Rencana kerja memuat program dan kegiatan disertai pendanaan indikatif untuk mencapai sasaran pembangunan dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka anggaran yang telah ditentukan. Rencana kerja disusun mengacu pada Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya untuk memecahkan masalah yang dihadapi dengan memperhatikan usulan program dan kegiatan masyarakat.

Rencana kerja ini juga secara sistematis menggambarkan apa yang seharusnya dilakukan dan bagaimana mencapainya, sehingga memudahkan dalam mengukur target capaian kinerja dalam setiap pentahapan pembangunan daerah. Melalui rencana kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Probolinggo, dapat menetapkan alternatif program atau kegiatan yang secara langsung berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan pelayanan dan strategi intervensi yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.